
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BPK-AD KANTOR
WALIKOTA MANADO**

Patras Thebora¹, Jenny Morasa², Sintje Rondonuwu³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : theborapatras65@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the factors that influence information value of local government financial reporting. Information value refers to reliability and timeliness. The factors that influence reliability and timeliness are human resource quality, information technology utilization, internal control system, and local financial monitoring. Local government financial management must be done according to the good governance, that are transparent and accountable, that allow users of financial statement to access about the result that local government accomplish. The objective of this research is to investigate the impact of human resources quality, utilization of information technology, local government financial controlling, and internal control system toward value of financial report information, which is timeliness. The research is taking place in BPK-AD of Mayor's Office, Manado. The research method used is quantitative, and the sample is all the population of the officer that works for the research object. The hypothesis test concludes that human resources quality, and utilization of information technology do not have significant impact, while local government financial control and internal control system do have significant effect towards timeliness of financial reporting in BPK-AD of Mayor's Office, Manado.

Keyword : *Information value, Local Government Financial Report, Human resource quality, utilization of information technologies, local government financial control, and internal control system*

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan (Abdul 2012: 20). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Alifah, 2014).

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kantor Walikota Manado sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti dari hasil pemeriksaan pada tahun 2014, dinyatakan bahwa dalam 504 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 251 LKPD dari 504 LKPD atau sebesar 49,80%. Namun, capaian LKPD ini masih di bawah target RPJMN 2010-2014 yang telah menetapkan opini WTP atau seluruh LKPD pada tahun 2014 (IHPS, 2015: 69).

Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD tahun 2014 mengungkapkan 5.978 permasalahan SPI. Permasalahan SPI tersebut meliputi 2.222 (37,17%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 (43,46%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.158 (19,37%) kelemahan struktur sistem pengendalian intern (IHPS, 2015: 76). Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD tahun 2014 juga mengungkapkan 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.638 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 2.442 (40,41%) kerugian daerah, 324 (5,41%) potensi kerugian daerah, 892 (14,88%) kekurangan penerimaan, dan 2.355 (39,30%) kelemahan administrasi. (IHPS, 2015: 80).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan waktu. Mengingat bahwa ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu ketepatan waktu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Ada terdapat bermacam-macam pengertian yang telah dikemukakan, tapi dari sekian pendapat yang ada kesemuanya intinya adalah sama. Adapun pendapat diantaranya sebagai berikut :

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi (Marshall 2014: 11).
2. Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Dari sudut pandang pemakai akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi berupa pelaporan keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan (Pujiyanti, 2015: 19).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut.

2.2. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, akuntansi pemerintahan adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Akuntansi pemerintahan menghususnya dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara (Deddy, dkk 2014: 4).

2.3. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*). Akuntabilitas dalam instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Abdul, 2012: 83).

Yang dimaksud dengan transparansi yaitu informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan akuntabel yaitu pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Annisa, dkk (2014), transparansi diperlukan agar demikian masyarakat umum dan komunitas bisnis dapat mengawasi pelaksanaan negara secara obyektif. Apalagi prinsip dasar pertanggungjawaban berisi unsur penjelasan di dalam fungsi organisasi dan bagaimana mengatasinya mereka. Untuk itu, setiap pejabat negara harus melakukannya menjalankan tugasnya dengan jujur dan terukur sesuai dengan hukum dan peraturan dan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan Salah satu kepala sekolah pedoman pelaksanaan akuntabilitas adalah laporan pertanggungjawaban diserahkan secara teratur sesuai dengan peraturan.

2.4. Nilai Informasi

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Menurut Sinarwati (2015) pemakai akan mempercayai laporan keuangan jika informasi tersebut dipahami, tidak menyesatkan dan bermanfaat bagi pemakai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

1. Relevan,
 - Manfaat umpan balik (*feedback value*),
 - Manfaat prediktif (*predictive value*),
 - Tepat waktu (*timeliness*) dan
 - Lengkap.
 2. Andal,
 - Penyajian jujur,
 - Dapat diverifikasi (*verifiability*) dan,
 - Netralitas.
-

3. Dapat dibandingkan dan,
4. Dapat dipahami.

2.5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Sembiring (2013), kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kerjanya, seseorang akan lebih mudah memahami dan melaksanakan tugasnya. Ditambah dengan pelatihan yang diberikan dari instansi, maka membuat seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Selain itu, penguasaan teknologi dan kesehatan yang baik pun bisa menunjang kinerja. Dengan demikian semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap seseorang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kerjanya. Secara umum pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak positif karena memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya. Jadi jika teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. (Argo, 2015).

2.7. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 1 (satu) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Husna (2013) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

2.8. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Astuti, *dkk* (2014) Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi lima unsur pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya. Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

2.9. Ketepatanwaktuan (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan

Ketepatanwaktuan (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan dapat disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Zuliarti, 2012).

Menurut Triasaputra (2013) ketepatanwaktuan pelaporan keuangan bukan hanya dibutuhkan oleh organisasi sektor publik saja, tetapi organisasi non sektor publik juga membutuhkan hal yang sama yaitu ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Ketepatanwaktuan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Sehingga dapat mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan.

2.10. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Laporan yang dipublikasikan disusun berdasarkan standar akuntansi sehingga laporan keuangan dapat terjawab dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan PT Entitas lainnya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi (Suwanda, 2015).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Pituringsih, 2015).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3.1.1. Jenis Data

Dalam melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa jawaban responden dalam bentuk kuesioner yang diukur dengan skala.

3.1.2. Sumber Data

Data diperoleh dari BPK-AD kantor Walikota Manado. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data tersebut berupa kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada BPK-AD Kantor Walikota Manado.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah Pemerintah Kota Manado, yaitu BPK-AD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kantor Walikota Manado yang beralamat di Jalan B.W. Lapien Tikala Kota Manado. Waktu Penelitian adalah dimulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan selesai.

3.3. Prosedur Penelitian

1. Interview

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak perusahaan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dan mengamati apa yang menjadi sasaran bahan pengambilan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan.

3. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak perusahaan dan industri mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai BPK-AD Kantor Walikota Manado. Sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. (Koncuru, 2013: 118).

Penyempelan atas responden dilakukan secara *purposive*. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang dibagian BPK-AD, yang meliputi pegawai sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 30 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian ini dilakukan suatu teknik atau metode melalui data tertulis dan data tidak tertulis yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan yang merupakan langkah pengumpulan data dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian, dengan mengajukan surat permohonan kepada pihak terkait untuk dapat membantu selama proses penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan memberikan data-data yang dibutuhkan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dan juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada kepala bagian dan staf sehubungan dengan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

3.6. Metode Analisis

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas kriteria diukur dengan cara menghitung korelasi antara skor masing masing butir dengan skor total menggunakan teknik korelasi person. Bilamana koefisien korelasi positif dan $\geq 0,3$ maka indikator yang bersangkutan dianggap valid (Wibowo, 2012: 20).

Menurut Wibowo (2012: 20), salah satu pengukuran reliabilitas adalah menggunakan koefisien cronbach alpha, dimana jika nilai Alpha > 0,6 menunjukkan instrument tersebut reliabel.

3.6.2. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik yaitu *one sample Kolmogorov smirniw test*. Uji normalitas ini akan menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen variable*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF < 10.00 dan mempunyai *tolerance* diatas 0,10 dengan model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode uji heteroskedastisitas ini menggunakan Uji Koefisien Korelasi Spearman's rho yaitu dimana mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

3.6.3. Pengujian Hipotesis

1. Uji-t (uji parsial)

Uji parsial atau uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara individu terhadap variabel terikatnya. Bentuk pengujianya adalah sebagai berikut :

Ho1 : $\beta=0$ (kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Ha1 : $\beta\neq 0$ (kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Ho2 : $\beta=0$ (pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Ha2 : $\beta\neq 0$ (pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Ho3 : $\beta=0$ (pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Ha3 : $\beta\neq 0$ (pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Ho4 : $\beta=0$ (sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Ha4 : $\beta\neq 0$ (sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan)

Selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan tingkat signifikansi (α) $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan ($n-k$) dengan t_{hitung} yang diperoleh dengan kriteria uji yang digunakan adalah :

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel X dan Y ada hubungannya.
2. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya variabel X dan Y tidak ada hubungan.

2. Uji F

Menurut Ramadhanti (2016), test F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan independen variabel pada variabel dependen. Bukti dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Kriteria uji yang digunakan adalah:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 ditolak

Arti dari data statistik yang digunakan untuk membuktikan bahwa semua variabel independen memiliki berpengaruh pada nilai variabel.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel} (n-k-1)$ maka H_0 diterima

Arti dari data statistik yang digunakan untuk membuktikan bahwa semua variabel independen tidak memiliki berpengaruh pada nilai variabel.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi (R^2) berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Nilai R dapat divariasikan dari -1 sampai dengan +1 (positif satu) dimana :

1. Jika nilai $R = 0$ (nol) atau mendekati nol maka hubungan antara kedua variabel adalah sempurna *positif* atau kuat sekali.
2. Jika $R = +1$ (*positif* satu) atau mendekati satu maka hubungan antara kedua variabel adalah sempurna positif atau kuat sekali.
3. Bila $R = -1$ (*negative* satu) atau mendekati *negative* satu maka hubungan antara kedua variabel adalah sempurna *negative* atau kuat sekali.

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan sebagai patokan untuk menunjukkan seberapa besar variabel mampu menjelaskan variabel terkait dan mengetahui kelayakan model analisis yang digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang. Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin kuat hubungan kedua variabel. Jika $R^2 = 0$ maka tidak ada korelasi dan jika $R^2 = 1$ maka ada korelasi sempurna.

3.7. Variabel Penelitian

3.7.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam hubungannya dengan judul yang ditetapkan, menjadi variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern.

3.7.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, maka yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

3.8. Definisi Operasional

3.8.1. Kualitas sumber daya manusia (X1)

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.8.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan (*internet*), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Argo, 2015). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.8.3. Pengawasan Keuangan Daerah (X3)

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan dapat membantu penyelenggaraan pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yang terdiri dari penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi, pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata & membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.8.4. Sistem Pengendalian Intern (X4)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.8.5. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan (Y)

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Berikut kriteria penilaian dalam kuesioner, yaitu :

1. Sangat Tidak Setuju, mempunyai skor 1,
2. Tidak Setuju, mempunyai skor 2,
3. Netral, mempunyai skor 3,
4. Setuju, mempunyai skor 4, dan
5. Sangat Setuju, mempunyai skor 5.

Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskriptif Data Responden

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Pria	13	43%
Wanita	17	57%
TOTAL	30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin Wanita sebesar 57%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar badan pengelola keuangan dan aset daerah kantor walikota manado adalah berjenis kelamin Wanita.

2. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SLTA	10	33%
DIPLOMA	6	17%
S1	13	47%
S2	1	3%
TOTAL	30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar berpendidikan S1. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 47%.

3. Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Staf	15	50%
Penata Laporan Keuangan	14	47%
Kasubid. Monev Keuangan	1	3%
TOTAL	30	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di BPK-AD Kota Manado jumlah jabatan paling besar adalah staf. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 50%.

4. Pelatihan

Pelatihan	Frekuensi	Presentase
Prajabatan	11	37%
Bimtek Pengelolaan Keuangan	5	17%
TOT. Keuangan Daerah Tahun 2015	4	13%
TOTAL	20	67%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelatihan yang paling banyak diikuti oleh responden adalah Prajabatan. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 37%.

4.1.2. Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
KSDM1	0,619	0,361	Valid
KSDM2	0,430	0,361	Valid
KSDM3	0,682	0,361	Valid
KSDM4	0,514	0,361	Valid
KSDM5	0,568	0,361	Valid
KSDM6	0,545	0,361	Valid
KSDM7	0,508	0,361	Valid
KSDM8	0,564	0,361	Valid
PTI1	0,637	0,361	Valid
PTI2	0,661	0,361	Valid
PTI3	0,704	0,361	Valid
PTI4	0,602	0,361	Valid
PTI5	0,567	0,361	Valid
PTI6	0,704	0,361	Valid
PTI7	0,531	0,361	Valid
PTI8	0,608	0,361	Valid
PTI9	0,378	0,361	Valid
PTI10	0,520	0,361	Valid
PKD1	0,669	0,361	Valid
PKD2	0,861	0,361	Valid
PKD3	0,844	0,361	Valid
PKD4	0,442	0,361	Valid
PKD5	0,559	0,361	Valid
SPI1	0,680	0,361	Valid
SPI2	0,497	0,361	Valid
SPI3	0,556	0,361	Valid
SPI4	0,637	0,361	Valid
SPI5	0,716	0,361	Valid
KT1	0,818	0,361	Valid
KT2	0,654	0,361	Valid
KT3	0,474	0,361	Valid
KT4	0,683	0,361	Valid

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing koesioner memiliki r hitung lebih dari r tabel ($r \text{ hitung} > 0,361$), yang berarti masing-masing item dari variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

4.1.3. Uji Reliabilitas

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	9

Dari nilai reliabilitas kualitas sumber daya manusia *Cronbach's Alpha* sebesar 0,726 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 ($0,726 \geq 0,60$).

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Cronbach's Alpha	N of Items
.748	11

Dari nilai reliabilitas pemanfaatan teknologi informasi *Cronbach's Alpha* sebesar 0,748 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 ($0,748 \geq 0,60$).

3. Sistem Pengendalian Intern

Cronbach's Alpha	N of Items
.736	6

Dari nilai reliabilitas pemanfaatan teknologi informasi *Cronbach's Alpha* sebesar 0,736 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 ($0,736 \geq 0,60$).

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	6

Dari nilai reliabilitas pemanfaatan teknologi informasi *Cronbach's Alpha* sebesar 0,773 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 ($0,773 \geq 0,60$).

5. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	5

Dari nilai reliabilitas pemanfaatan teknologi informasi *Cronbach's Alpha* sebesar 0,727 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60 ($0,727 \geq 0,60$).

4.1.4. Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.74470924
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.154
	Positive	.073
	Negative	-.154
Kolmogorov-Smirnov Z		.844
Asymp. Sig. (2-tailed)		.475

Berdasarkan nilai signifikansi dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* sebesar 0,475 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.590	4.899		-.937	.358		
X1	.156	.100	.232	1.554	.133	.882	1.133
X2	.134	.070	.302	1.930	.065	.802	1.247
X3	.243	.108	.341	2.239	.034	.846	1.182
X4	.246	.113	.340	2.176	.039	.803	1.245

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10. Sementara itu, nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10.00. Sehingga pengujian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

			KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	SISTEM PENGENDALIAN INTERN	Unstandardized Residual
Spearman's rho	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Correlation Coefficient	1.000	-.374*	.135	-.181	.024
		Sig. (2-tailed)	.	.042	.475	.339	.898
		N	30	30	30	30	30
	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Correlation Coefficient	-.374*	1.000	-.080	.477**	-.127
		Sig. (2-tailed)	.042	.	.675	.008	.504
		N	30	30	30	30	30
	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Correlation Coefficient	.135	-.080	1.000	-.106	-.015
		Sig. (2-tailed)	.475	.675	.	.579	.939
		N	30	30	30	30	30
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN	Correlation Coefficient	-.181	.477**	-.106	1.000	-.348
		Sig. (2-tailed)	.339	.008	.579	.	.060
		N	30	30	30	30	30
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.024	-.127	-.015	-.348	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.898	.504	.939	.060	.	
	N	30	30	30	30	30	

Berdasarkan output pada Tabel 4.13 di atas diketahui bahwa nilai signifikan variabel kualitas sumber daya manusia (X1) sebesar 0,884, variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) sebesar 0,488, untuk variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0,594, dan untuk variabel sistem pengendalian intern (X4) sebesar 0,009. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada variabel X1, X2 dan X3 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadinya Heteroskedastisitas. Sementara itu nilai signifikan pada variabel X4 lebih kecil dari 0,05 yang artinya terjadinya Heteroskedastisitas.

4.1.5. Pengujian Hipotesis

1. Uji-t (uji parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.590	4.899		-.937	.358		
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	.156	.100	.232	1.554	.133	.882	1.133
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFOMASI	.134	.070	.302	1.930	.065	.802	1.247
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH	.243	.108	.341	2.239	.034	.846	1.182
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	.246	.113	.340	2.176	.039	.803	1.245

- Nilai t_{hitung} untuk kualitas sumber daya manusia (1,554) lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1,708) atau nilai sig. (0,133) lebih besar dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menerima H_0 dan menolak H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.
- Nilai t_{hitung} untuk pemanfaatan teknologi informasi (1,930) lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1,708) atau nilai sig. pemanfaatan teknologi informasi (0,065) lebih besar dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menerima H_0 dan menolak H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.
- Nilai t_{hitung} untuk pengawasan keuangan daerah (2,239) lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1,708) atau nilai sig. pengawasan keuangan daerah (0,034) lebih kecil dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menolak H_0 dan menerima H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.
- Nilai t_{hitung} untuk sistem pengendalian intern (2,176) lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1,708) atau nilai sig. sistem pengendalian intern (0,039) lebih kecil dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menolak H_0 dan menerima H_a . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah di BPK-AD Kantor Walikota Manado.

2. Uji F (uji simultan)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	16.717	4	4.179	6.496	.001 ^b
Residual	16.083	25	.643		
Total	32.800	29			

Pada Tabel 4.15 diketahui hasil F_{hitung} adalah sebesar 6,496. Besarnya nilai F_{tabel} pada df_1 (jumlah variabel - 1) = 4 dan df_2 (n-k-1) atau 30-6-1 = 23

maka diperoleh F_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ sebesar 2,80. Hasil penelitian menunjukkan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ H_a diterima.

Dengan demikian hasil uji F menyatakan H_a diterima, artinya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($6,496 > 2,80$).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.510	.431	.802

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas diperoleh nilai koefisien R^2 sebesar 0,510 atau (51,3%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase sambungan pengaruh variabel independen (kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern) terhadap variabel dependen (ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah) mampu menjelaskan sebesar (51,3%) variasi variabel dependen (ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah). Sedangkan sisanya sebesar (48,7%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian dimana tingkat signifikan sebesar $0,133 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lismawati (2012) yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kualitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, masih ada pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Sinarwati (2014) menghasilkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan.

4.2.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan

keuangan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian dimana tingkat signifikan sebesar $0,065 > 0,05$. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Pujiswara (2014), Sinarwati (2014) dan Trisaputra (2013) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu.

4.2.3. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian dimana tingkat signifikan sebesar $0,034 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagia, *dkk* (2014), Pujiswara (2014), Sinarwati (2014) dan Trisaputra (2013) yang menghasilkan pengawasan keuangan daerah signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4.2.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian dimana tingkat signifikan sebesar $0,039 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagia, *dkk* (2014) dan Sinarwati (2014) yang menghasilkan sistem pengendalian intern signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.
3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Agar ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern. Dengan peningkatan dan perbaikan tersebut akan mampu mengurangi adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan yang tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bagi peneliti berikutnya supaya dapat memfokuskan sampel penelitian. Karena penelitian ini hanya memfokuskan di BPK-AD Kantor Walikota Manado.

Sehingga bagi peneliti berikutnya sebaiknya memperluas dan mengambil sampel di pemerintahan daerah lain.

3. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, misalnya komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat.
- Alifah, Syayyudah. 2014. *"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada PK BLU Universitas Negeri Surabaya)"*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Annisa, dkk. 2014. *"Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia"*. Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Indonesia.
- Argo, Trihapsoro. 2015. *"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah"*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Astuti, dkk. 2014. *"Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia"*. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Bagia, dkk. 2014. *"Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)"*. Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Deddy, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta*.
- Husna, Fadhillah. 2013. *"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang Panjang)"*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Padang.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 2.
- Lismawati, 2012. *"Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah"*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Surabaya.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems*. Edisi 13. Salemba Empat.
- Pituringasih, dkk. 2015. *"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur"*. Fakultas Akuntansi Universitas Mataram.
- Pujiyanti, Ferra. 2015. *Akuntansi Dasar Penerbit: Lembar Pustaka Indonesia*. Tangerang.

- Pujiswara, dkk. 2014. “*Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)*”. Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ramadhanti, dkk. 2016. “*The Effect of Used Information Technology, Internal Control, and Regional Accounting System on the Performance of City Governance Agency of Banda Aceh City, Indonesia* “. Dept of Accounting, Faculty of Economics and Business University of Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.
- Sembiring, Febriady. 2013. “*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah*”. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Sinarwati, dkk. 2014. “*Pengaruh Kualitas Sdm, Pemanfaatan Ti, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Sinarwati, dkk. 2015. “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Jembrana)*. Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Suwanda, Dadang. 2015. “*Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)* “. Faculty of Economics and Business, University of Padjajaran Bandung.
- Trisaputra, Andry. 2013. “*Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Wiboyo, Agung Edy. 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Gava Media. Yogyakarta.
- Zuliarti, 2012. “*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan